

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat penelitian	7
a. Manfaat Akademis	7
b. Manfaat Praktis	7

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran	8
1.5.1. Keterbukaan Informasi Publik	8
1.5.2. Implementasi Kebijakan	13
1.5.3. Dinamika Komunikasi Pemerintah	14
1.5.4. Kendala dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan	18

BAB II . TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu tentang Keterbukaan Informasi Publik	19
2.2. Keterbukaan Informasi Publik	21
2.2.1. Asas dan Tujuan UU KIP	23
2.2.2. Informasi dalam UU KIP	24
2.2.3. Keberatan, Sengketa Informasi, dan Ajudikasi	27
2.3. Implementasi Kebijakan	28
2.2.1 Kendala Implementasi Kebijakan	29
2.4. Peranan Aktor dalam Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	31
2.5 Dinamika Komunikasi Pemerintah	35
2.6 Elemen Komunikasi Pemerintah	37
2.7 Komunikasi Internal dan Eksternal Pemerintah	38
2.8 Aliran Informasi	39
2.9 Pola Aliran Informasi	55
2.10 Teori Informasi Karl Weick	57

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Objek Penelitian	43

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian	44
3.4 Sumber data	44
3.5 Informan	45
3.6 Teknik Analisis Data	46

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	48
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Klaten	48
4.1.2. Visi dan Misi Pembangunan Klaten	52
4.1.3. Strategi Pembangunan Klaten.....	53
4.1.4. Ringkasan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)	
Pemerintah	54
4.1.5. Karakteristik Masyarakat Klaten	57
4.2 Inovasi Pelayanan Publik	63
4.3 Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	65
4.4 Hasil Penelitian	67
4.4.1. Aktor dan Peranannya dalam Implementasi KIP di Klaten	68
1.1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	74
1.2. Pemohon Informasi	78
1.3. Komisi Informasi	80
1.4. Pola Hubungan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan	
Masyarakat	87
4.4.2. Karakteristik Aliran Informasi Pemerintah Kabupaten Klaten	
Dalam Pelaksanaan Kebijakan KIP	90

2.1. Catatan Informasi Publik Pada Pemerintah Kabupaten Klaten	90
2.2. Penyebaran Informasi Pemerintah Kabupaten Klaten	94
2.3. Pola Aliran Informasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan KIP	95
4.4.3. Isu-Isu Utama Pelaksanaan Kebijakan KIP di Pemerintah Kabupaten Klaten.....	96
3.1. Pengorganisasian Informasi Dalam Menghadapi Pemeringkatan Pelaksanaan KIP.....	97
3.2. Kendala dalam Pelaksanaan KIP	101
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	104
2. Rekomendasi	108
DAFTAR PUSTAKA	110